

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAYARAN
HUTANG DENGAN PRESENTASE HARGA JUAL
(Studi Kasus di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten
Lampung Barat)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

CUCU ANGGUN SULISTIO NINGSIH

NPM. 1321030035

Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi syari'ah)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1438 H/ 2018 M

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAYARAN
HUTANG DENGAN PRESENTASE HARGA JUAL
(Studi Kasus di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten
Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

CUCU ANGGUN SULISTIO NINGSIH

NPM: 1321030035

Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi syari'ah)

Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1438 H/ 2018 M

ABSTRAK

Hutang piutang adalah perkara yang biasa dilakukan dalam interaksi kehidupan manusia. Penelitian ini berawal dari pembayaran hutang dengan presentase harga jual di Desa Tuguratu. Penjualan tanah dengan ketentuan NJOP Tanah Pada Tahun 1993 sebesar Rp.6.400 /Meter persegi x 1000 /Meter persegi =Rp 6.400.000, berawal pada tahun 1993 penjual tanah menjualnya kepada sepasang suami istri dengan harga Rp 6.000.000, sang istri memberikan uang dengan nominal yang sama dengan harga tanah tersebut kepada suami, tetapi suami hanya membayarkan sebesar Rp 5.000.000, sehingga masih memiliki kekurangan Rp 1.000.000, dari tahun 1993 sampai tahun 1998 pak Warsono selama 5 tahun tidak memberi tahu kepada istrinya tentang hutang tersebut. Pada tahun 1998 Bapak Warsono meninggal dunia, pada tahun 2017 tanah itu akan dijual oleh istri Bapak Warsono (Ibu Nurjanah) tetapi Bapak Imron selaku penjual tanah meminta kekurangan hutang jika tanah itu terjual sesuai dengan harga tanah sekarang atau sesuai NJOP (nilai jual objek pajak) tanah dia meminta 10% dari harga jual tadi. Sedangkan bukti dari kekurangan hutang tersebut hanya dicatat si penjual saja tanpa adanya saksi dan tanda tangan si pembeli.

Berdasarkan Permasalahan di atas yang menarik diteliti adalah bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran hutang dengan presentase harga jual yang terjadi di Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembayaran hutang dengan presentase harga jual dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam pembayaran hutang dengan presentase harga jual yang terjadi di Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu mengumpulkan data secara langsung yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa, istri bapak Warsono bersedia membayar kekurangan pembelian tanah tersebut sesuai yang di minta oleh penjual (Bapak Imron) 10% dari harga jual tanah jika tanah itu terjual, ternyata sampai skripsi ini ditulis tanah tersebut belum terjual. Adapun ketentuan hukum Islam terhadap pembayaran hutang dengan presentase harga jual tersebut adalah boleh karena hutang piutang di daerah tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku tanpa adanya saksi dan tanda tangan si pembeli, dan si pembeli ingin mengambil kemaslahatan sebab jika tidak dibayar mungkin akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pihak penjual, sebagaimana qawaidul fiqiyah yang artinya “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM
PEMBAYARAN HUTANG DENGAN PRESENTASE
HARGA JUAL (STUDI KASUS DI DESA TUGU RATU
KECAMATAN SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT)**

Nama Mahasiswa : **CUCU ANGGUN SULISTIO NINGSIH**
NPM : **1321030035**
Program Studi : **Muamalah**
Fakultas : **Syari'ah**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Firdaweri, M.H.I.
NIP: 195509191982032004

Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197504282007101003

Ketua Jurusan Muamalah

H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP: 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAYARAN
HUTANG DENGAN PRESENTASE HARGA JUAL (Studi Kasus di Desa Tugu
Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat) disusun oleh Cucu Anggun
Sulistio Ningsih NPM 1321030035 Jurusan Mu'amalah, Telah diujikan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Muslim, M.H.I.

Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I.



**Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Mamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197009011997031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...¹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisa : 29)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (semarang : CV. Toha Putra, 1989), h.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sujar Yanto dan Ibunda Nur Siyah tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik, menasehati saya sejak dari kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendo'akan dengan tulus ikhlas dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat do'a restu keduanyalah sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Adik ku tersayang Gayuh Khoirul Ibad serta Keluarga besar saya, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Saya dilahirkan di Suoh (Lampung Barat), pada tanggal 12 November 1995, dengan nama lengkap Cucu Anggun Sulistio Ningsih anak dari buah cinta kasih pasangan bapak Sujar Yanto dengan ibu Nur Siyah yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan menyelesaikan pendidikan di:

1. SDN I Suoh, Lampung Barat lulus pada tahun 2007.
2. Mts Baitul Ulum Suoh, Lampung Barat lulus pada tahun 2010.
3. MA Darul A'mal Metro, lulus pada tahun 2013.
4. Tahun 2013, diterima sebagai mahasiswa di IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah pada Program Studi Muamalah (hukum ekonomi syariah).

Bandar Lampung, Maret 2018
Penulis

Cucu Anggun Sulistio Ningsih

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul Pandangan Hukum Islam Dalam Pembayaran Hutang Dengan Persentase Harga Jual (studi kasus di Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Karena saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prov. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung.
4. Drs. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung.
5. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Tim penguji skripsi, Marwin, S.H., M.H. selaku ketua siding munaqosah,
Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.selaku penguji 1, Dra. Firdaweri, M.H.I.
selaku penguji 2, dan Muslim, S.H., M.H.I, selaku sekretaris.
7. Bapak H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah,
dan Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Muamalah.
8. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I. selaku pembimbing I, yang telah meluangkan
waktu dalam membimbing untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah
menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan
arahan agar tersusunnya skripsi ini.
10. Seluruh Dosen, Asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden
Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti
perkuliahan.
11. Kedua orangtuaku yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang
tak pernah henti dihaturkan disetiap sujudmu.

12. Adek, kakek, Sepupu, dan keluarga besar terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
13. Sahabat-sahabatku Anggita, Yupita Sari Panggabean, Resti Ramayanti, Rohmah Fauziah, Juwita Rohmatul Ulla, Eka Permata Sari, terimakasih atas support dan do'anya selama ini. lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
14. Orang-orang yang selalu mendukungku, Andika Sari Edi Purnomo, Roudotul Janah, Mona Zahra, Taras Nayana.
15. Teman-teman KKN kelompok 30 Sidomulyo Lampung Tengah
16. Seluruh kakak tingkat serta adik tingkat Angkatan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Jurusan Muamalah semoga kita semua sukses..
17. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku.

Semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada mereka semua akhirnya saya mengharapakan semoga skripsi ini dapat dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Maret 2018
Penulis

Cucu Anggun Sulistio Ningsih

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 14 |
| A. Jual Beli (Al-Ba'i/Al-Buyu) | 14 |
| 1. Pengertian Jual Beli. | 14 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli..... | 16 |
| 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli..... | 19 |
| 4. Khiyar dalam Jual Beli. | 25 |
| 5. Macam-macam Jual Beli | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam..... | 32 |
| B. Hutang Piutang..... | 41 |
| 1. Pengertian Hutang Piutang. | 41 |
| 2. Dasar Hukum Hutang Piutang..... | 44 |
| 3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang..... | 54 |
| 4. Pembayaran dan Tanggung Jawab Peminjam. | 57 |
| 5. Faktor Terjadinya Hutang Piutang. | 60 |
| 6. Tata Krama Berhutang..... | 61 |
| 7. Berakhirnya Hutang Piutang | 62 |
| 8. Pengertian akad dan Perubahan dalam Pelaksanaan Akad dalam Hukum islam. | 63 |
| BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN..... | 67 |
| A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat | 67 |
| 1. Sejarah Berdirinya Desa..... | 67 |
| 2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Tuguratu | 67 |
| 3. Kondisi Sosial Ekonomi..... | 69 |
| 4. Kondisi Sosial Budaya | 71 |
| 5. Kondisi Sosial Keagamaan..... | 72 |
| 6. Struktur Organisasi..... | 72 |
| B. Sistem Jual Beli..... | 74 |
| C. Praktek Hutang Piutang..... | 75 |
| BAB IV ANALISIS | 77 |
| A. Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Persentase Harga Jual di Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat | 77 |
| B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat | 79 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 87 |
| | A. Kesimpulan | 87 |
| | B. Saran..... | 88 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAYARAN HUTANG DENGAN PRESENTASE HARGA JUAL (studi kasus di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)”** untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam

- a. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).¹
- b. Hukum Islam menurut bahasa yaitu hukm (حُكْم), jamaknya ahkâm (أَحْكَام) yang berarti, antara lain menolak. Dari sinilah terbentuk kata

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007)h.95.

al-hukm (الحكم) yang, antara lain, berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. al-Islam, الإسلام, "berserah diri kepada Tuhan" adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT.² Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy adalah koleksi daya upaya fuqaha (ahli hukum Islam) untuk menerapkan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³

Jadi yang dimaksud dengan Pandangan hukum Islam adalah tinjauan secara hukum dalam Islam.

2. Pembayaran Hutang Dengan Persentase Harga Jual

Pembayaran yaitu berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.⁴

Hutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *ad-dain*, dan *al-qardl*.⁵ *Dain* dan *Qardl* memiliki sifat yang sama yaitu keduanya memiliki penggunaan yang bersifat menghabiskan barang yang menjadi objek muamalah, dan keduanya adalah hak yang berada di dalam tanggungan.⁶

Persentase adalah sebuah angka atau perbandingan (rasio) untuk

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.178.

³TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1975),h.68.

⁴Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.(Jakarta Bumi Aksara:2010),h.117.

⁵ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah, dkk, *kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 54dan 272.

⁶ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Jafar Shadiq Terjemah*, (Jakarta :Lentera, 2009), h. 405.

menyatakan pecahan dari seratus. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol "%". Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan.⁷

Harga Jual adalah Besarnya Harga yang akan dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi ditambah biaya nonproduksi dan laba yang diharapkan.⁸

Jadi yang dimaksud dengan pembayaran hutang dengan presentase harga jual adalah pembayaran hutang dengan keuntungan 10% dari besarnya harga jual yang didapatkan .

Berdasarkan berbagai istilah diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam dalam pembayaran hutang dengan persentase harga juala dalah meninjau atau pemahaman mengenai sistem pelaksanaan pembayaran hutang dengan persentase harga jual persepektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat dengan alasan memudahkan penulis menggali data, sebab dekat dengan domisili penulis.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, permasalahan pemahaman mengenai sistem pembayaran hutang dengan persentase harga jual persepektif hukum Islam. Namun ada hal yang tidak berlaku dalam pembayaran hutang semestinya, melainkan pembayaran hutang dengan harga persentase harga jual.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.77.

⁸Mulyadi, *Akutansi Biaya*, (Yogyakarta:UPPAMP Yogyakarta, 2005), h.56

2. Alasan Subjektif, adanya literatur primer maupun sekunder yang mendukung pembahasan skripsi ini, dan pembahasan skripsi ini juga relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas Syari'ah khususnya jurusan Mu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah

Permasalahan hutang piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang piutang berkonotasi pada uang dan bank yang di pinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah di terima dengan yang sama. Hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya, seperti menghutangkan uang Rp 2.000,000 akan di kembalikan Rp 2.000,000 pula". Sedangkan menurut bahasa arab hutang piutang sering disebut *Al-qardh*.⁹

Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidak merataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini.

Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h.306.

kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah sedikit banyak telah bercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menyisihkan, menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, perkara hutang piutang ini penting untuk diketahui oleh umat Islam agar nantinya bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah swt.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁰

Ayat ini adalah bentuk ketegasan legalitas jual beli dan keharaman riba.

Firman Allah dalam Q. S An Nisa (4) Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

Pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di

Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat berawal pada

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 27.

¹¹ *Ibid.*, h. 83

tahun 1993 penjual tanah menjualnya kepada sepasang suami istri dengan harga Rp.6.000.000, sang istri memberikan uang dengan nominal yang sama dengan harga tanah tersebut kepada suami, tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.5.000.000 oleh suami tersebut, sehingga masih memiliki kekurangan Rp.1.000.000 sampai sang suami meninggal pada tahun 1993. Pada Tahun 2017 sang istri berniat menjual tanah tersebut, tetapi penjual meminta pembayaran kekurangan pembelian tanah sewaktu itu 10 % dari penjualan tanah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat dengan mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang mekanisme pembayaran hutang dengan persentase harga jual. Kemudian bagaimanakah pandangan Islam tentang pembayaran hutang dengan presentase harga jual tersebut. Fenomena ini menarik untuk diperbincangkan dan dikaji dalam konteks hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran hutang dengan presentase

harga jual yang terjadi di Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem pembayaran hutang dengan presentase harga jual dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi

stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.HI pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹² Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹³ Yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini

¹²R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo 2008), h. 2-3

¹³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, (Bandung:CV. Mandar Maju, 1996), h. 81

tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁴

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis.¹⁵ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran hutang dengan presentase harga jual. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari istri

¹⁴Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1986),

¹⁵Kartini Kartono, *Metode Research*, (Bandung:Mandar, 1990), h.28.

¹⁶Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h. 57

pembeli tanah di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹⁷ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian¹⁸ atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari penjual dan pembeli tanah pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.¹⁹ Berdasarkan pendapat Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang di ambil adalah semua bagian dari populasi. Jika dapat diambil antar 10-15% atau 20-25%.

¹⁷*ibid*, h. 57.

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1991), h. 102

¹⁹*Ibid*, h. 104

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁰ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²¹ Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan penjual dan pembeli tanah di di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada pembeli dan penjual tanah.

c. Dokumentasi

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²²

²⁰*Ibid.*

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

²²Suharsimi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1991),h.188.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²³ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan di perbaiki.

b. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

c. *Sistemating* Data

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²⁴ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pandangan hukum Islam dalam

²³ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar lampoon:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

pembayaran hutang dengan persentase harga jual yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembayaran hutang dengan persentase harga jual. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai pembayaran hutang dengan persentase harga jual dalam pandangan hukum Islam.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁵ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran hutang dengan persentase harga jual dalam hukum Islam dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dimasyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional hingga modern sampai saat ini. Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “*al-bai*” (البيع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain.¹

Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat ulama fiqh mendefinisikan jual beli, sekalipun memiliki substansi dan tujuan yang sama antara lain sebagai berikut :

a. Menurut ulama Hanafiah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu :

1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ (وَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ) وَتَحْوِ هِمَا،
أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلَعَةِ بِالتَّقْدِيرِ وَتَحْوِهِ عَلَى مَخْصُوصٍ وَجْهٍ²

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 67.

²Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu :

وَهُوَ مَبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ³

“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”

b. Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتْعَةً لَذَّةً⁴

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁵

3) Definisi dalam arti khusus, yaitu :

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتْعَةً لَذَّةً أَوْ مُكَائِسَةً أَحَدُ عَوَاضِيَةٍ غَيْرُ ذَهَبٍ

³*Ibid.*, h. 135

⁴Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 204

⁵Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 69

لَا فِضَّةً، مُعَيَّنٌ الْعَيْنِ فِيهِ⁶

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran benda atau barang dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi benda atau barang dan pihak lain sebagai penerima benda atau barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara’ dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai’ atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’ an. Al-Qur’ an

⁶ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Op.Cit.*, h. 372

⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 70

adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.⁸

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyingung tentang jual beli, di antaranya:

1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁹

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.¹⁰

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu kejahatan jailiyah yang amat hina.¹¹ Menurut Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi adapun yang disebabkan riba tersebut yaitu bencana besar,

⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h. 18

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 48

¹⁰M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721

¹¹Haji Abdul Maluk Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juz" 1-3, Yayasan Nurul Islam, h. 65

musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima riba maka kefakiran akan datang padanya dengan cepat.¹²

2) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencarikarunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”¹³

3) Q.S. An-Nisaa’ (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.¹⁵

¹²Surawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 31

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 47

¹⁴*Ibid.*, h. 83

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, *Op.Cit.*, h. 413

Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt. mengahalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka.¹⁶ Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya.

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkan*", artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.¹⁷ Adapun rukun jual beli adalah:

1) Penjual

Penjual haruslah pemilik harta yang akan dijualnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya, orang dewasa, dan tidak bodoh.

2) Pembeli

Pembeli haruslah orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, tidak boleh orang bodoh dan anak kecil yang belum di izinkan

¹⁶Imam Syafi' i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Loc.Cit.*, h. 1

¹⁷M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 300-301

untuk itu.

3) Barang yang dijual

Barang yang dijual harus mubah dan bersih serta dapat diterima, dan diketahui (walaupun hanya sifatnya) oleh pembeli.

4) Sighat

Sighat berbentuk ijab dan qabul dengan suatu ungkapan seperti “jualah kepadaku dengan harga sekian” kemudian penjual mengatakan, “aku jual kepadamu” atau dengan mengatakan, “jual kepadaku baju,” missal, lalu memberikannya kepadanya.

5) Persetujuan kedua belah pihak

Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jual beli tidak sah.¹⁸

Dengan demikian jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya maka suatu pekerjaan tersebut batal karena tidak terpenuhinya syara', tidak terkecuali dalam urusan jual beli harus memenuhi rukun-rukunnya agar jual beli tersebut dikatakan sah.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal. Adapun syarat jual beli antara lain :

1) Dua pihak yang berakad, syaratnya yaitu :

a) *Baligh*

¹⁸Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (MinhajulMuslim) Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 1991), h. 40

Baligh yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haidh*) bagi anak perempuan). Ciri-ciri *baligh* yaitu :

- (1) *Ihtilam*: keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- (2) *Haidh* : Keluarnya darah kotor bagi perempuan.
- (3) Rambut: Tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
- (4) Umur : Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

b) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. An-Nisaa (4) ayat ke 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

“dan janganlah kamu memberikan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...”¹⁹

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa *baligh* artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.²⁰

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 75

²⁰ Hamzah Ya" qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), h. 80

c) Dengan kehendak sendiri

Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.²¹ Oleh karena itu, apabila jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. *Q.S. An-Nisaa (4) ayat 29*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka di antara kamu...”²²

Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya untuk menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah yang didasarkan atas kebenaran.²³

²¹Madani, *Op.Cit.*, h. 104

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 84

²³Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 366

d) Tidak pemboros atau tidak *mubadzir*

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.

Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Swt. Qs An-Nisaa (4) ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”²⁴

Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros (*mubadzir*) hukumnya adalah tidak sah.

2. Objek akad , harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ²⁵

- a) Suci atau bersihnya barang
- b) Harus dapat dimanfaatkan
- c) Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad

Syarat yang ketiga ialah barang yang dijual harus dimiliki oleh orang yang berakad (si penjual). Apabila dia sendiri yang

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h.77

²⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *KifayatulAkhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwardan K.H. Mishbah Mustafa, Bahagian Pertama, Cet. Ke-2, (Surabaya: CV. Bina Iman, 1995), h. 539

melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu. Al Wazir pernah berpendapat bahwapara ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan kekuasaanya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang bathil.²⁶

d) Berkuasa menyerahkan barang itu

Syarat yang keempat ialah berkuasa atau mampu menyerahkan barang yang dijual. Baik kemampuan yang dapat dilihat mata, maupun kemampuan menurut ukuran *syarak*.

e) Barang itu dapat diketahui

Syarat yang kelima ialah barang yang hendak diperjualbelikan harus dapat diketahui oleh pembeli. Syarat yang ini tidak boleh ditinggalkan, sebab Nabi Saw., melarang jual beli yang mengandung penipuan. Akan tetapi tidak disyaratkan tahu segala-galanya, cukup pemberi tahu bendanya, ukurannya, dan sifat- sifatnya. Oleh karenanya, harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

3. Sighat atau lafadz akad (ijab kabul).

Menurut ulama yang mewajibkan *lafadz*, terdapat beberapa syarat

²⁶Saleh al-Fauzan, *Op.Cit.*, h. 367

yang perlu diperhatikan, antara lain :²⁷

- a) Satu sama yang lainnya berhubungan disuatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- c) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
- d) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh jual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.²⁸

4. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Khiyar adalah yaitu jual beli di mana para pihak memberikan kesempatan untuk memilih.²⁹ *Khiyar* secara *syar'i* adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad. *Khiyar* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan hadits Rasulullah Saw. :

²⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.

²⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Op.Cit.*, h. 50

²⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 99

حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَلَمَّ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَا حَدُّهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرَوْا رَبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ. (رواه البخاري ومسلم)

“Meriwayatkan Abu Nu” man, meriwayatkan Hamad bin Zaidin, meriwayatkan Ayyub dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa Nabi Saw. bersabda: “dua pihak yang saling jual beli, salah satunya menggunakan hak memilih (Khiyar) terhadap pihak lain, selama keduanya belum berpisah kecuali mengenai jual beli dengan Khiyar.” (H.R. Bukhari Muslim)

Khiyar ada tiga macam, yaitu:³⁰

- a. *Khiyar majelis*, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih selama keduanya masih berada di tempat jual beli;
- b. *Khiyar syarat*, artinya *Khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah satu pihak;
- c. *Khiyar ‘aib*, artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya, sedangkan pada biasanya barang itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tau, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.

Selain ketiga kategori *khiyar* tersebut, prof. Dr. Muhammad Thahir Mansori membagi *khiyar* ke dalam empat macam, tambahannya adalah

³⁰Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm 286

khiyar al-ghabn. *Khiyar al-ghabn* adalah hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan. *Khiyar al-ghabn* dapat diimplementasikan ke dalam situasi berikut ini :³¹

a. *Tasriyah*

Tasriyah bermakna mengikat kantong susu untabetina atau kambing supaya air susu binatang tersebut berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak.

Menurut pandangan mayoritas ulama, tindakan *tasriyah* ini membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan.

2) *Tanajush*

Tanajush bermakna menawarkan harga yang tinggi suatu barang tanpa ada niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

3) *Ghabn Fahis*

Ghabn fahisy adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan oleh pihak lain.

4) *Talaqqi Al-Rukban*

Talaqqi al-rukban merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang

³¹Mardani, *Op.Cit.*, hlm 107

primer dan kebutuhan pokok untuk dijual.

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.³²

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk³³, yaitu:

- a. Jual beli yang kelihatan, yaitu yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian diantara satu pihak.

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:³⁴

- a. Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik

h. 71 ³²Sohari Sahrani dan Ru' fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

³³H.A. Khumaedi Ja" far, *Op. Cit.*, h. 20

³⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 128-129

orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat keduanya.

b. Jual beli yang bathil yaitu jika jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi,

macam-macam jual beli bathil:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Menurut para ulama fikih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsur tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.

4) Jual beli barang najis

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamar, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna makna dalam arti hakiki menurut syara'.

5) Jual beli *al-urbhan*

Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada si penjual maka uang

muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.³⁵

6) Jual beli *fasid*

Menurut ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan maka hukumnya batal. Seperti menjual-beliakan benda-benda haram (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Diantara jual beli yang *fasid* menurut ulama hanafiyah, antara lain: ³⁶

- a) Jual beli *al majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
- c) Jual beli barang yang *ghoib*, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Jual beli orang buta, dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual-belikan. Menurut fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak *khiyar* sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah, jual beli

³⁵*Ibid.*, h.130

³⁶Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2009), h.125-126

orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual-belikan bersifat *majhul*.³⁷

- e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya barang-barang yang diharamkan menjadi harga.
- f) Jual beli *ajal*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-.
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar. Apabila penjualan anggur itu produsen khamr.
- h) Jual beli yang bergantung pada syarat.
Seperti ungkapan pedagang : “jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berhutang harganya Rp. 15.000,-“.
- i) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.³⁸

³⁷Ghufron A. Mas" adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Semarang:IAIN Walisongo, 2002), h. 136-138

³⁸M. Ali Hasan, *Op.Ci.*, h. 129

6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Rasulullah SAW. Melarang jual-beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan dikalangan kaum muslim.³⁹ Berkaitan dengan hal ini, Wahbah al-Juhaili⁴⁰ membagi :

a. Jual beli yang dilarang karena ahlih atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :

1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap

³⁹Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 78

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 99

dipandang tidak sah.⁴¹

4) Jual beli Fudhlul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizing pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).⁴²

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli Malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual-belikan), antara lain:

1) Jual beli Gharar

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau

⁴¹*Ibid.*, h. 100

⁴²H.A. Khumaedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 150

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. *Mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).⁴³

Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ
(رواه أحمد)⁴⁴

Abdullah bin Mas" ud rahawasanya Nabi SAW, Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu). (HR. Ahmad).

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam⁴⁵:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya,
- b) Tidak diketahui harga dan barang,
- c) Tidak diketahui sifat barang atau harga,
- d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga,
- e) Tidak diketahui masa yang akan datang,
- f) Menghargakan dua kali pada satu barang,
- g) Menjual barang yang diharapkan selamat,
- h) Jual beli *husna*,
- i) Jual beli *munabadzah*,

⁴³Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 74

⁴⁴Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay" I Fadhlil Ma" i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar" I Kala" I Tahrim Mani Badlaihi WA Tahrimu Bay" I Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, h.3494

⁴⁵Rachmat Syafe" I. *Op.Cit.*, h. 98

j) Dan Jual beli *mulasamah*.

Sedangkan dalam ketidak tahuan akan zat barang atau harga adalah bentuk dari gharar yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat dan kadarnya diketahui.

Sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Berikut pendapat para *puqaha* antara lain⁴⁶:

- a) Mazhab Sayafi'i, Hambali dan Dhahiri, melarang transaksi jual beli semacam ini baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur gharar.
- b) Sedangkan mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur gharar tidak berpengaruh terhadap akad.
- c) Mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga dan melarang yang melebihi dari tiga.

Dengan adanya pendapat para *fuqahab* mengenai ketidak tahuan akan zat barang atau harga termasuk gharar yang sedang karena hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak.

⁴⁶<http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/08/gharar.html> tanggal diakses: 24 Febuari 2017

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli Majhul

Yaitu jual beli yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.⁴⁷

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama (Al-Qur'an)

Menurut Imam Syafi'i benda benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual belikan tetapi juga tidak sah untuk diperjual belikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, *khamar*, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan.⁴⁸

⁴⁷Khumaedi Ja" far, *Op.Cit.*, h. 152

⁴⁸Zainuddin bin Abdul Az
iz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Darul Ihya" , Mesir. Tt, h.67

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ
(رواه البخارومسلم)⁴⁹

Sesungguhnya, Rasulullah SAW melarang jual-beli calon anak dari janin yang dikandung. (HR Bukhori Muslim)

7) Jual beli Muzabanah

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering. Oleh karena itu jual beli yang seperti itu dilarang.

8) Jual beli Muhaqallah

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungnya).⁵⁰

9) Jual beli Mukhadharah

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuap angin sebelum

⁴⁹Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muutoj*, Juz II, h. 2

⁵⁰Sayyid Sabid, *Op.Cit.*, h.79

dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.⁵¹

10) Jual beli Mulammasah

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli Munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁵²

c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab Kabul)

1) Jual beli Mu" athahYaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan Kabul

⁵¹Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 143

⁵²*Ibid.*, h.144

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.⁵³

3) Jual beli Munjiz

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.⁵⁴

4) Jual beli Najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena

⁵³H.A. Khumaedi Ja" far, *Op. Cit.*, h. 156

⁵⁴Sayyid Sabid, *Op.Cit.*, h.79

dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى يَبِعِ أَخِيهِ (رواه البخاري
ومسلم)⁵⁵

Rasulullah SAW bersabda : Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. (HR. Bukhori Muslim)

6) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tau harga pasar, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

عُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نُهِنَا أَنْ يَبِيعَ
حَا ضِرْ لِبَادٍ (زواه البخاري ومسلم)⁵⁶

Diceritakan Muhammad bin Mutsanna, diceritakan Ibnu „Un dri Muhammad berkata dari Anas bin Malik r.a. berkata: Kami dilarang (oleh Nabi Saw.) seorang penduduk menjualkan barang orang yang baru datang dari dusun. (H.R. Bukhari Muslim)

7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini

⁵⁵ Sayyid Sabid, *Op.Cit.*, h.79

⁵⁶ *Ibid.*, No. Hadits 2029, hlm. 818

juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁵⁷

B. Hutang-Piutang

1. Pengertian Hutang-Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.⁵⁸ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁵⁹ Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁶⁰

Hutang piutang secara timologi dalam bahasa arab adalah (الْعَارِيَّة) diambil dari kata (عَارَ) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ‘*ariyah* berasal dari kata (رَوَاعٍ تَلَا) yang sama artinya dengan saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.⁶¹

⁵⁷*Ibid.*, No. Hadits 2029, hlm. 22

⁵⁸Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), h.1136

⁵⁹*Ibid*, h.760.

⁶⁰R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang HukumPerdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.451.

⁶¹Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, h.263.

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya⁶², antara lain:

a. Menurut Hanafiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

b. Menurut Malikiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

c. Menurut Syafi'iyah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

e. Menurut Ibnu Rif'ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

f. Menurut Al-Mawardi

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Ahli fiqh berpendapat bahwa '*Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya.

⁶²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.91-92.

Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.⁶³

‘*Ariyah* dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.⁶⁴ Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁶⁵

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar

⁶³Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), h.493.

⁶⁴Gemala Dewi, SH.,LL.M, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), h.48.

⁶⁵Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), h.136.

hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT.). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Berikut adalah fungsi turunnya Al-Qur'an kepada umat manusia⁶⁶, antara lain:

- 1) Sebagai **هُدًى** atau petunjuk bagi kehidupan manusia
- 2) Sebagai **رَحْمَةً** atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayang-Nya.

⁶⁶Syekh H.Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*,(Jakarta:Kencana, 2006), h.334.

- 3) Sebagai ناقرف atau pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang dilakukan.
- 4) Sebagai تظوم atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 5) Sebagai عرشب atau berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.
- 6) Sebagai نايتت atau هيم yang berarti penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
- 7) Sebagai قدصم atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
- 8) Sebagai روو atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
- 9) Sebagai ليصفت yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.
- 10) Sebagai رودصلاءفش atau obat bagi rohani yang sakit.
- 11) Sebagai ميكح yaitu sumber kebijaksanaan.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam

Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah (5) ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”⁶⁷

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.⁶⁸

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), h.85.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h.222.

تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ⁶⁹

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan. Firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor :Syaamil Qur'an, 2007), h.315

عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutangitu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul : Pada waktu rasulullah saw datang kemadinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun."⁷⁰

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan al-Arab* (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapan⁷¹. Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah:

- 1) Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi ta'kid dan takrir.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 47

⁷¹ M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat:Pustaka Firdaus, 2000), h.13-14.

3) Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang menerangkan tentang hutang piutang adalah:

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَرَ رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ جُلَّ بَكْرِهِ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَيْرًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه مُسْلِمٌ)⁷²

“Dari Abu Rafi” a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi” i berkata, “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.” maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Muslim no.880)

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Hutang piutang harus disertakan dengan niat yang baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan, seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini:

⁷² Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th), h.1223.

عَنْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيِّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْذَرَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَحْدَرَ يَرِيدُ ثَلَاثًا فَهَا أَتْلَفُهُ اللَّهُ. (رواه البخاري)⁷³

“Abdul Aziz bin Abdillah Al Awaisi: meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghais, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda ”barangsiapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya. Dan barangsiapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya”. (HR. Bukhari no.2387).

c. Ijma’

Secara etimologi, ijma’ mengandung dua arti, yaitu:

1. Ijma’ dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma’ dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Q.S Yunus (10): 71
2. Ijma’ dengan arti “sepakat“. Ijma’ dalam arti ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Yusuf (12):15

Adapun pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar’i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. Beberapa rumusan ijma’ adalah sebagai berikut:

⁷³ Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004), h.430

1. Al-Ghazali merumuskan ijma' sebagai kesepakatan umat nabi Muhammad secara khusus tentang satu masalah agama. Rumusan ini memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan oleh umat nabi Muhammad yaitu umat Islam.
2. Al-Amidi yang juga pengikut Syafi'iyah merumuskan ijma' harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat.
3. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam (pemuka kelompok Nazhmiyah, satu pecahan dari Mu'tazilah) mengemukakan rumusan ijma' sebagai setiap pendapat yang didukung oleh hujjah sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang.

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, mislanya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).⁷⁴

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyari'atkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala

⁷⁴Muhammad Syafe" i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.132.

dari Allah. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara'.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

a. Rukun Hutang Piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli⁷⁵, yaitu:

- 1) Yang berhutang dan yang berpiutang
- 2) Barang yang dihutangkan
- 3) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutangpiutang (*'ariyah*) hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun *'ariyah*. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam *'ariyah* disyaratkan adanya lafadh *sighat akad* yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

Sedangkan Drs. Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa rukun hutang piutang ada 4 macam⁷⁶, yaitu:

- 1) Orang yang memberi hutang

⁷⁵Ibid, h.173.

⁷⁶Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Op. Cit.*, h.136.

- 2) Orang yang berhutang
- 3) Barang yang dihutangkan (objek)
- 4) Ucapan Ijab dan Qabul (Lafadz)

Dengan demikian hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu.

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun *'ariyah* ada empat yaitu:

- 1) Mu'ir (peminjam)

Syarat-syarat bagi mu'ir adalah:

- a) Baligh
- b) Berakal
- c) Orang tersebut tidak dimahjur

- 2) Musta'ir (yang meminjamkan) Syarat-syarat bagi musta'ir adalah:

- a) Baligh
- b) Berakal
- c) Orang tersebut tidak dimahjur

- 3) Mu'ar (barang yang dipinjamkan)

Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan:

- a) Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *'ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan.

- b) Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal ‘*ariyah* yang pengambilan manfaat materinyadibatalkan oleh syara’ seperti meminjam benda-benda najis.
- 4) Sighat (yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan). Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti orang berkata “saya hutangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “saya mengaku berhutang kepada kamu (sebutkan benda yang dipinjam)”.

b. Syarat Hutang Piutang

Dr. H. Nasrun Haroen MA dalam bukunya *Fiqh Muamalah*⁷⁷ menyebutkan bahwa syarat dalam akad, ‘*ariyah* adalah sebagai berikut:

1) Mu’ir berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan ‘*ariyah* ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya.

- a) ‘*ariyah* batal jika dilakukan oleh anak kecil
- b) ‘*ariyah* batal jika dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila
- c) ‘*ariyah* tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (curatelle), seperti pemboros.

⁷⁷H. Nasrun Haroen MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.240.

2) Pemegangan barang oleh peminjam

3) '*Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.

Adapun syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:

a) Barang tersebut halal atau milik sendiri

b) Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat

c) Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak

4) Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah.

5) '*ariyah* tidak sah apabila materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.

6) *Ariyah* batal apabila pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh *syara'*, seperti meminjam benda-benda najis.

c. Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang *mubah* (dibolehkan *syara'*).

4. Pembayaran dan Tanggung Jawab Peminjam

a. Pembayaran

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang memberikan pinjaman (*musta'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau

membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Rasulullah Saw bersabda:

أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَاِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمِثْمِ وَالْمَغْرَمِ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْ ثَرَمَا تَسْتَعِذُ بِ وَوَعَدَ فَلْ خَلَفَ. (رواه البخارى)⁷⁸

Abu Yaman meriwayatkan: Syu" aib meriwayatkan dari Zuhri, dan Ismail meriwayatkan. Dia berkata: saudara laki-laki ku telah menceritakan kepadaku, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Ibnu Atiq, dan Ibnu Syihab dari Urwah, sesungguhnya Aisyah RA., bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa dalam sholat beliau, "Wahai Allah" sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Seseorang berkata kepada beliau, "alangkah banyaknya engkau berlindung dari hutang, wahai Rasulullah?" beliau bersabda, "sesungguhnya seseorang apabila hutang dan berkata, maka ia berdusta, dan apabila berjanji, maka ia mengingkari." (HR. Bukhari no. 2397).

Pembayaran hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh peminjam (mu'ir). Dalam hal ini tentunya mu'ir harus benar-benar mempunyai niat baik serta keyakinan untuk menunaikan pembayaran atas hutang tersebut. Berikut adalah firman Allah tentang pembayaran hutang.

QS Al-Muzzammil (73) ayat 20:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَهُ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ

⁷⁸ Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004), h.432

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
 فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁷⁹

b. Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Peminjam juga mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian pada awal terjadinya hutang piutang. Peminjam (mu'ir) mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan perjanjian hutang piutang seperti pada ayat Al-Qur'an berikut ini, QS. Al-Isra' (17) ayat 34:

⁷⁹ Departemen RI, Op. Cit. hlm. 575

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."⁸⁰

5. Faktor Terjadinya Hutang Piutang

Ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang yaitu:

a. Under Earning

Ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari.

b. Over Spending

Boros merupakan gaya hidup seseorang di mana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar. Penghasilannya mungkin akan menutupi kebutuhan hidupnya, tapi mereka bisa mengontrol keinginan pribadinya yang begitu besar.

c. Un-Expected

Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang diduga-duga. Seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehingga mereka terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian tersebut.⁸¹

⁸⁰ Departemen RI, Op. Cit. hlm. 575

⁸¹ <https://Id.Facebook.Com/Kilaubintangbanksaudara/Posts/576421909078771>, Tanggal 23 Desember 2017.

Sedangkan menurut H.A Khumaidi Ja'far dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* dijelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berhutang⁸², antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b. Kebiasaan berhutang sehingga jika hutangnya sudah lunas menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi.
- c. Karena kalah judi sehingga ia berhutang untuk membayar kekalahan.
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
- e. Untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkannya (gengsi).

6. Tata krama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam 'ariyah tentang nilai dan sopan santun yang terkait didalamnya⁸³, ialah:

- a. Sesuai dengan QS Al-Baqarah: 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya /mengembalikannya.

⁸²Khumedi Ja" far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.172.

⁸³H. Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.98.

- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya.

Lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. Sedangkan solusi Islam untuk orang yang tidak mampu membayar hutang⁸⁴ adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil hutang pokoknya saja (kapital). Mengambil hutang pokok tidak akan mendzalimi orang yang berhutang dengan mengambil laba dari hutang pokok.
- b. Menambah penangguhan waktu pembayaran hutang, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 280 yang artinya “Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah penangguhan sampai dia lapang”.
- c. Membebaskan hutang

7. Berakhirnya Hutang Piutang

Akad utang piutang (*qard*) berakhir apabila objek akad (*qarad*) ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian *qarad* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung. Tetapi

⁸⁴ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h.98.

apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qarad* di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur).

Akad utang piutang (*qard*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qarad* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

8. Pengertian Akad dan Perubahan dalam Pelaksanaan Akad Menurut Hukum Islam

a. Pengertian akad

Akad mempunyai arti mengikat, menyambung, atau menghubungkan.⁸⁵

Akad merupakan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁸⁶

Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang akad, QS. Al-Maidah (5) ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

⁸⁵ Ahmad Abu Al-Fath, *Al-Mu'amalat Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Qawanin Al-Mishriyyah*, (Mesir: Matba'ah Al-Busfir, 1913), h.139.

⁸⁶ Basya, *Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifah Ahwal Al-Insan*, (Kairo: Dar Al-Furjani, 1983), h.49.

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁸⁷

Akad mempunyai rukun-rukun pembentukannya, yaitu⁸⁸:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul-‘aqd*)
- 3) Objek akad (*mahallul-‘aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*)

Sedangkan syarat akad yaitu⁸⁹:

- 1) Para pihak yang berakad mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*).
- 2) Akad tidak dilarang oleh nash syara’.
- 3) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan.
- 4) Akad itu bermanfaat.
- 5) Ijab tetap utuh sampai kabul dan dilakukan dalam satu majelis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses atau transaksi.

b. Perubahan dalam Pelaksanaan Akad Menurut Hukum Islam.

Perubahan dalam pelaksanaan akad lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tersebut, perjanjian

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor :Syaamil Qur'an, 2007), h.84

⁸⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), h.96.

⁸⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.105.

diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.⁹⁰

Kaidah fiqh adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fiqh yang tercakup dalam pembahasannya. Kaidah fiqh dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan fiqh yang tercakup dalam hukum kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaidah fiqh tersusun berdasarkan ijtihad para ulama dan didasarkan atas sebuah *qiyas* atau *ta'lil* (melihat sebab dari sebuah hukum) atau dengan melihat kepada sifat hukum syar'i secara umum serta melihat kepada *maqashid syar'iyah* (maksud dan tujuan dari sebuah hukum syar'i) atau yang lainnya.⁹¹ Berikut ini adalah salah satu kaidah fiqh tentang muamalah:

تَقْبِاسًا تَلَاكَ وَلَاكَ تَقَحْلًا زَاجِلًا

“Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tetapi, berdasarkan kaidah tersebut, apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain, dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang

⁹⁰<http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/35701/3/Chapter%20II.Pdf>, Tanggal 20 Oktober 2016.

⁹¹<http://www.radiorodja.com/2014/11/27/pengertian-kaidah-fiqih-faidah-sumber-dan-hukum-berhujjah-dengan-kaidah-fiqih-kaidah-fiqih-ustadz-abu-yala-kurnaedi-lc/>, Tanggal 20 Oktober 2016.

tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta.⁹² Perubahan dalam pelaksanaan akad dapat terjadi karena beberapa hal yaitu⁹³:

- 1) Akad dalam perjanjian tersebut telah rusak sehingga harus diperbarui dengan akad lain.
- 2) Adanya khiyar.
- 3) Adanya pembatalan akad secara sepihak.
- 4) Pihak yang melakukan akad tidak dapat melaksanakan akad pada waktu yang telah disepakati.

⁹²<http://trainingictsusilawati.blogspot.co.id/2016/05/kaidah-fiqih-muamalah.html>,
Tanggal 20 Oktober 2016.

⁹³Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h.98

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat

1. Sejarah Berdirinya DesaTugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat

Desa Tugu Ratu Kecamatan adalah Pekon kolonasi yang datang dari beberapa daerah. Desa Tugu Ratu pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan dna hutan lindung, perkiraan pada tahun 1968an datanglah sekelompok penduduk sejumlah 68 KK dan sebanyak 136 juta jiwa. Masyarakat tersebut membuka dan menggarap tanah di Desa Tugu Ratu. Penduduk Desa Tugu Ratu saat ini bermayoritas dari suku Jawa yang berasal dari berbagai daerah di sekitar Provinsi Lampung ataupun di luar Provinsi Lampung. Pembangunan dibidang pertanian, pendidikan dan alat transportasi di desa Tugu Ratu sudah cukup maju.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Tuguratu

Kecamatan Suoh pusat Pemerintahan Desa Sumber Agung dengan luas wilayah $\pm 28m08 \text{ km}^2$, jarak ke Ibukota Kabupaten $\pm 60 \text{ km}$ dan terdiri dari 10 (sepuluh) desa yaitu : Desa Suoh, Desa Sri Mulyo, Desa Sumber Agung, Desa Tugu Ratu, Desa Suka Marga, Desa Banding Agung, Desa Bandar

Agung, Desa Rowo Rejo, Desa Bumi Hamtatai dan Desa Gunung Ratu.¹

Demografi dan letak geografis dari penduduk Desa Tugu Ratu yaitu:

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Pekon Tanjung Sari, Kecamatan BNS
- 2) Sebelah Selatan : BANDING, Kecamatan bengkumat
- 3) Sebelah Timur : PEKON BANDING AGUNG, Kecamatan Suoh
- 4) Sebelah Barat : Pekon Sumber Agung, Kecamatan Suoh

b. Luas Wilayah Pekon

- 1) pemukiman :55 Ha
- 2) Pertanian Sawah : 235 Ha
- 3) Ladang/tegalan :297 Ha
- 4) Hutan :3.000 Ha
- 5) Rawa-rawa :32 Ha
- 6) Perkantoran :2 Ha
- 7) Sekolah :8 Ha
- 8) Jalan :3000 M
- 9) Lapangan Sepak Bola :1 Ha

c. Jumlah penduduk

- 1) Perantin Keluarga : 1.312 KK
- 2) Laki-laki : 2.494 Jiwa
- 3) Perempuan : 2.222 Jiwa

¹ Profil Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, *dicatat*, tanggal 2 November 2017

d. Jarak Tempuh Desa Tugu Ratu

- 1) Jarak ibu kota kecamatan terdekat : 10 KM
- 2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
- 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 80 KM
- 4) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 8 Jam

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Tugu Ratu berdasarkan :

a. Pertanian

| No | Jenis Tanaman | Luas |
|----|---------------|--------|
| 1 | Padi sawah | 230 Ha |
| 2 | Padi ladang | - |
| 3 | Jagung | - |
| 4 | Palawija | 12 Ha |
| 5 | Tembakau | 3 Ha |
| 6 | Sawit | - |
| 7 | Karet | - |
| 8 | Tebu | - |
| 9 | Kakao/Coklat | 400 Ha |
| 10 | Singkong | 2/4 Ha |
| 11 | Kopi | 25 Ha |
| 12 | Kelapa | 5 Ha |

b. Pertenakan

| No | Jenis Ternak | Jumlah |
|----|--------------|----------|
| 1 | Kambing | 35 ekor |
| 2 | Sapi | 7 Ekor |
| 3 | Kerbau | - |
| 4 | Ayam | 300 Ekor |
| 5 | Itik | 50 Ekor |
| 6 | Burung | 100 Ekor |

c. Struktur Mata Pencarian

| NO | Jenis Pekerjaan | Presentase |
|----|-----------------|------------|
| 1 | Petani | 75% Orang |
| 2 | Pedagang | 5% Orang |
| 3 | PNS | 2% Orang |
| 4 | Tukang | 5% Orang |
| 5 | Guru | 7% Orang |
| 6 | Bidan/Perawat | 1% Orang |
| 7 | Buruh | 5% Orang |
| 8 | Swasta | 5% Orang |

4. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi Sosial Budaya di Desa Tugu Ratu Pada Tahun 2017 berdasarkan:

a. Agama

Penduduk Desa Tugu Ratu berjumlah laki-laki 2.494 Jiwa dan perempuan 2.222 Jiwa semua memeluk agama islam.

b. Pendidikan

- 1) TK/RA :330 Orang
- 2) SD/MI :444 Orang
- 3) SLTP/MTs :270 Orang
- 4) S1/Diploma :160 Orang
- 5) Buta Huruf :300 Orang
- 6) Putus Sekolah :-

c. Kesehatan

- 1) Jumlah ibu melahirkan :20 orang
- 2) Jumlah bayi yang meninggal :2 Orang
- 3) Cakupan imunisasi
- 4) Cakupan Imunisasi Polio 3 : 0 Orang
- 5) Cakupan Imunisasi DPT-1 : 0 Orang
- 6) Cakupan Imunisasi Cacar : 0 Orang
- 7) Gizi Balita
 - a) Jumlah Balita : 130 Orang
 - b) Balita Gizi Buruk : 9 Orang
 - c) Balita Gizi Baik :100 Orang

d) Balita Gizi Kurang : 31 Orang

8) Pemeliharaan air bersih

a) Penggunaan Sumur Galian : 600 KK

b) Penggunaan Air PAM : 100 KK

c) Penggunaan Sumur Pompa : 0 KK

d) Penggunaan Sumur Hidra Umum : 10 KK

e) Penggunaan Air Sungai : 50 KK

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Data keagamaan pekon Tugu Ratu Tahun 2017

a. Jumlah pemeluk :

1) Islam : 4.716 orang

2) Katholik : 0 orang

3) Kristen : 0 orang

4) Hindu : 0 orang

5) Budha : 0 orang

b. Tempat Ibadah Masjid/Mushola berjumlah 13 tempat.

6. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh

Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

a. Peratin Pekon : Basuki

b. Sekretaris Pekon : Bambang Irawan

- c. Urusan Umum dan Tata Usaha : Sufa'at
- d. Urusan Keuangan : Andian Rohman
- e. Urusan Perencanaan : -
- f. Seksi Pemerintahan : Adenan
- g. Seksi Pemberdayaan : Supriyanto
- h. Seksi Pembangunan : Sugiono Mp
- i. Bendahara Pekon : Andian Rohman
- j. Pemangku:
 - 1) Pemangku Kali Bening Barat : Misgianto
 - 2) Pemangku Kali Bening Timur : Pulung Abdul Rahman
 - 3) Pemangku Taman Sari Barat : Lutfi Iswanto
 - 4) Pemangku Taman Sari Tengah : Suratno
 - 5) Pemangku Taman Sari Timur : Rohman Sodik
 - 6) Pemangku Pungkalan Barat 1 : Suparjan
 - 7) Pemangku Pungkalan Barat 2 : Bahyu Wahyu Mudi
 - 8) Pemangku Pungkalan Tengah 1 : Adi Purwanto
 - 9) Pemangku Pungkalan Tengah 2 : Hemi Suhadi
 - 10) Pemangku Pungkalan Timur : Khayat
 - 11) Pemangku Margamulyo : Basrowi
 - 12) Pemangku Tirtoluhur : Ahmad Sahirin

Dengan Visi dan misi sebagai berikut :

1. **VISI:** "Mewujudkan Pekon Tugu Ratu Menjadi Pekon Mandiri professional dan asri”.
2. **MISI :**
 - a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Pekon yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal.
 - b. Bersama masyarakat dan kelembagaan pekon menyelenggarakan pemerintahan Pekon dan melaksanakan pembangunan Pekon yang partisipatif.
 - c. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Pekon Tugu Ratu yang mandiri, professional, aman, tentram dan damai.

B. SISTEM JUAL BELI

Berawal pada tahun 1993 salah satu penduduk desa Tugu Ratu, penjual tanah sepakat menjualnya kepada Bapak Warsono dan Ibu Nurjanah. Dalam praktik pelaksanaan jual beli tanah di Desa Tuguratu ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Adapun hal tersebut adalah:

1. Penetapan Harga

Penjualan Tanah seluas 1 Hektar dengan harga Rp.6.000.000. Ibu Nurjanah memberikan uang dengan nominal yang sama dengan harga tanah tersebut kepada suami, tetapi hanya dibayarkan Bapak Warsono sebesar

Rp.5.000.000, sehingga masih memiliki kekurangan Rp.1.000.000 sampai sang suami meninggal tanpa sepengetahuan Ibu Nurjanah.²

2. Kesepakatan

Transaksi jual beli tanah sampai dengan menjadi utang-piutang yang dibuat oleh kedua pihak tersebut dengan lisan dan tulisan yang hanya dimiliki oleh pihak penjual, sedangkan terhadap Bapak Warsono hanya berupa lisan dan tanpa adanya saksi, karena yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah sikap saling percaya. Tidak ada kesepakatan diantara penjual dengan bapak Warsono jangka waktu pelunasan hutang kekurangan pembayaran tanah tersebut. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi.

C. Praktek Utang Pembayaran

Praktek hutang pembayaran dengan presentase harga jual yang terjadi di desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat ini berdasarkan kesepakatan secara lisan dan tertulis yang hanya di miliki oleh penjual tanah.³ Pada Tahun 2017 sang istri berniat menjual tanah tersebut, tetapi penjual meminta pembayaran kekurangan pembelian tanah sebesar 10 % dari penjualan tanah tersebut.

² Wawancara dengan Ibu Nurjanah sebagai istri Bapak Warsono di Desa Tugu Ratu, tanggal 10 Desember 2017

³ Wawancara dengan Penjual Tanah di Desa Tugu Ratu, tanggal 9 Desember 2017

Kesepakatan perjanjian secara lisan antara Penjual dan Pembeli atas kekurangan pelunasan jual beli tanah tersebut sesuai kekurangannya yaitu Rp. 1.000.000 dan tidak ada jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi setelah mengetahui Ibu Nurjanah ingin menjual tanah tersebut, penjual tetap meminta pembayaran kekurangan pembelian tanah tersebut sebesar 10% dari penjualan, hal tersebut merugikan Ibu Nurjanah.

Menurut Bapak Sukaryo selaku ketua RT di desa Tuguratu, selaku masyarakat umum (tidak terlibat langsung dengan transaksi tersebut), menuturkan bahwa transaksi utang piutang dengan pembayaran presentase harga jual, ada yang memberatkan, namun ada pula yang meringankan. Transaksi utang piutang ini yang dianggap cukup meringankan adalah tidak adanya syarat-sarat maupun jaminan yang memberatkan yang seakan-akan menjadi beban. Transaksi ini dikatakan memberatkan karena unsur ketidakjelasan mengenai objek pembayaran, bisa mengalami keuntungan bisapula mengalami kerugian, karena pengembalian yang tidak sesuai nominal yang dipinjamkan.⁴

⁴ Wawancara dengan Sukaryodi Desa Tugu Ratu, tanggal 9 Desember 2017

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Persentase Harga Jual di Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat

Hutang-Piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang pun masih dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga telah dipraktikkan oleh warga masyarakat desa Tugu untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Qardh (utang-piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad qardh (utang-piutang) adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Pembayaran sesuatu benda yang tidak tunai.

Seperti lazimnya bentuk hutang-piutang yang terjadi, bagi orang yang berhutang, demikian pula yang terjadi di Desa Tugu Ratu. Pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat berawal pada tahun 1993. Salah satu penduduk desa Tugu Ratu, penjual tanah menjualnya kepada Bapak Warsono dan Ibu Nurjanah dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta), istri memberikan uang dengan nominal yang sama dengan harga tanah tersebut kepada suami, tetapi hanya dibayarkan Bapak Warsono sebesar Rp.5.000.000 (lima juta), sehingga masih memiliki kekurangan Rp.1.000.000

(satu juta) tanpa sepengetahuan Ibu Nurjanah sampai pada tahun 1998, suami meninggal. Sejauh itu pun penjual melakukan penagihan kekurangan pembayaran tanah tersebut ke istri Bapak Warsono.

Kesepakatan utang-piutang yang dibuat oleh kedua pihak tersebut dengan lisan dan tulisan hanya ada di buku penjual dan tidak ada kesepakatan berapa lama jangka waktu pembayaran pelunasan kekurangan jual beli tanah tersebut, tulisan yang ada pada Bapak Imron dan tanpa ada saksi, dan tidak ditandatangani oleh si pembeli (Bapak Warsono) karena yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah sikap saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Kesepakatan hitam di atas putih menjadi hal yang penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Jika dilihat, kehidupan para penjual dan pembeli tanah di desa Tuguratu yang terlibat dalam transaksi ini, secara ekonomi mereka tergolong sebagai tingkatan ekonomi cukup.

Pada Tahun 2017 Ibu Nurjanah (istri pak Warsono) berniat untuk menjual tanah tersebut, tetapi penjual mengetahui hal tersebut dan meminta pembayaran kekurangan pembelian tanah sewaktu itu 10 % dari penjualan tanah tersebut.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Persentase Harga Jual Di Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat

Kepemilikan tanah dapat dialihkan kepada orang lain. Peralihan hak atas tanah dapat melalui, jual beli, tukar menukar, hibah ataupun karena pewarisan. Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditentukan bahwa: “jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian, dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk pemindahan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini difokuskan kepada jual beli tanah, dimana dalam KUHPerdara Tentang Jual Beli Pasal 1457 menjelaskan: “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang ada mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”¹

Dalam prakteknya jual beli tanah tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, ada kalanya timbul hal-hal yang sebenarnya di luar dugaan, dan biasanya persoalan ini timbul dikemudian hari. Semampu apapun dalam membuat perjanjian tidak dapat dipungkiri adanya celah-celah kelemahan yang suatu hari jika terjadi sengketa menjadi celah-celah untuk dijadikan alasan-alasan dan pembelaan diri dan pihak yang akan membatalkan, bahkan mencari keuntungan sendiri dari perjanjian tersebut.

¹ Lihat KUHPerdara Tentang Jual Beli Pasal 1457

Demikian pula yang terjadi di Desa Tugu Ratu, pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah berawal pada tahun 1993. Salah satu penduduk desa Tugu Ratu, penjual tanah menjualnya kepada Bapak Warsono dan Ibu Nurjanah dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta), istri memberikan uang dengan nominal yang sama dengan harga tanah tersebut kepada suami, tetapi hanya dibayarkan Bapak Warsono sebesar Rp.5.000.000 (lima juta), sehingga masih memiliki kekurangan Rp.1.000.000 (satu juta) tanpa sepengetahuan Ibu Nurjanah sampai pada tahun 1998, suami meninggal. Sejauh itu pun penjual melakukan penagihan kekurangan pembayaran tanah tersebut ke istri Bapak Warsono. Penjual tanah meminta 10% dari penjualan tanah yang pernah dibeli oleh bapak Warsono dan Ibu Nurjanah karena belum terlunasi.

Pandangan hukum islam dari akad jual beli yang berujung menjadi utang-piutang yang tidak memiliki kesepakatan yang akurat secara tertulis hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah Qs. Al-Baqoroh (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُؤْا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فِإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutangitu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul : Pada waktu rasulullah saw datang kemadinah pertama kali orang-orang

penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun."²

Dari surat Al-Baqarah tersebut dapat kita lihat barang siapa menyewakan (menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat 282 sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi dan menganjurkan supaya seseorang yang melakukan utang-piutang hendaknyamenentukan waktu pengembalian utang serta diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang berhubungan dengan utang piutang yang dilakukan. Hal ini untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang dengan cara pencatatan yang benar agar tidak menimbulkan keraguan yang dianjurkan dalam islam. Pada transaksi jual beli yang berujung utang piutang hendaknya didasari dengan kejujuran diantara keduanya terutama pada bapak Imron (penjual tanah).

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ

عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

“Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengadzab orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS.Al-Ahzab:24)³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.128

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.160

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.”(QS. An-Nahl:105)⁴

Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh adalah sebagaimana berikut ini:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ⁵

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya apa yang diadakan.”

Maksud dari kaidah diatas bahwa keridhoan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama oleh karena itu transaksi dikatakan sah apabila didasarkan keridhoan kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang ditandai dengan kesepakatan dalam ijab dan qabul. Syarat-syarat dalam pelaksanaan akad utang-piutang sama halnya dengan syarat-syarat jual beli, adapun ijab qabul merupakan lafazh yang memberikan hutang. Orang yang mampu membayar hutang namun menunda-nunda disebut sebagai pelaku kezhaliman, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَأَعِذُوا أَتْبَعُ أَحَدَكُمْ عَلَى مِلِّيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.188

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130

⁶ Abu'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Ja'mi' al-Sahih*, Juz. III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), h. 94

“Telah menceritakan kepada ‘Abdullah bin Yusuf’, telah mengabarkan kepada Malik, dari Abi Zanad, dari A’raj, dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.”

Penundaan Pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu termasuk dosa besar dan pelakunya menjadi fasik karenanya. Ada perbedaan Pendapat tentang ke fasikan ini. Fasik yang jatuh sebelum penagihan hutang atau menjadi fasik dengan sendirinya karena penundaan itu. Hal ini disebabkan penafsiran yang timbul dari hadis ini bahwa orang yang menghutangi harus menagih terlebih dahulu, karena sesungguhnya penundaan pembayaran hutang tidak akan terjadi kecuali bersama penagihan itu.

Dengan demikian, pada dasarnya akad qard tersebut termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.⁷ Pokok permasalahan yang timbul adalah bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah sebesar 10 % dari sesuai NJOP Penjualan Tanah tersebut yang diminta Bapak Imron selaku penjual.

Secara bahasa kata makruh berarti sesuatu yang dibenci. Dalam istilah ushul fiqh, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dan jika ditinggalkan akan mendapat pujian dan jika dilanggar tidak berdosa.⁸

⁷ <http://www.aufklarungblog.co.cc/2009/06/yang-dimaksud-riba-dalam-islam.html> diakses tanggal 1 Januari 2018.

⁸ <http://tantawi-ushulfiqh.blogspot.co.id/2010/12/hukum-syara.html> diakses tanggal 3 Maret 2018.

Dengan demikian jika di lihat transaksi tersebut terjadi antara bapak Warsono sebagai pembeli dengan bapak Imron sebagai penjual dengan akad jual beli mereka sudah sah, tetapi timbul kesenjangan adanya kekurangan pembayaran kurang sebesar RP 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak di ketahui oleh istri bapak Warsono, dan bukti hutang bagi si penjual juga tidak ada tanda tangan pak Warsono yang berhutang, dan juga tidak ada tanda tangan saksi. Maka kebenaran hutang masih di ragukan. Walaupun demikian karena sudah menjadi tradisi di Desa tersebut dan hutang itu juga di akui oleh istri bapak Warsono untuk di bayar walaupun jumlah hutangnya di sepakati antara mereka berdua sesuai dengan NJOP selaras dengan hitungan 10% dari penjualan tanah.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa si pembeli ibu Nurjanah (istri bapak Warsono) bersedia membayar, hukumnya adalah boleh berdasarkan kesepakatan pihak yang bersangkutan sebagai mana firman Allah Qs. An Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa transaksi tersebut sudah di lakukan suka sama suka, dengan perhitungan menghilangkan kemudrotan yang lebih besar. Karna kalau tidak di bayar setelah tanah itu terjual, kemungkinan besar bapak Imron sebagai penjual tidak senang hati melihat ibu Nurjanah mendapatkan uang yang sangat banyak. Sebagaimana qawaidul fiqiyah yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَافَا سِيْدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَابِ الْمَصَالِحِ⁹

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Tetapi karena transaksi bukti surat tidak di tandatangani oleh pihak yang berhutang. Keabsahan hutang itu juga di pertanyakan, si penjual menghindari hal demikian. Dalam hal ini penjual tidak boleh meminta standar nominal yang dia inginkan dari hutang pembelian tanah tersebut.

⁹ Beni Ahmad Soebani dan H. Januri, Fiqih Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia , 2009), h.261

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, kiranya dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat tidak dengan mengikuti prosedur pada umumnya yaitu dengan tidak ada bukti tertulis yang akurat dimiliki kedua belah pihak dan saksi dalam jual beli. Ibu Nurjanah selaku istri dari Bapak Suwarno (Alm) harus membayar kekurangan pembayaran jual beli tanah yang belum terlunasi pada tahun 1993 hingga tahun 2017 dengan sebesar 10% sesuai NJOP tanah dari penjualan jual tanah yang sampai sekarang tanah tersebut belum terjual.
2. Pandangan Hukum Islam dalam pembayaran hutang dengan persentase harga jual di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Pandangan hukum islam dari akad jual beli yang berujung menjadi utang-piutang yang tidak memiliki kesepakatan yang akurat secara tertulis hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah Qs. Al-Baqoroh (2) ayat 282. Pembayaran hutang yang harus dibayar oleh Ibu Nurjanah terhadap penjual tanah dengan 10% dari hasil penjualan tanah tersebut adalah boleh berdasarkan kesepakatan pihak yang bersangkutan sebagai mana firman Allah Qs. An-Nisa ayat 29 yang

menjelaskan bahwa transaksi tersebut sudah dilakukan suka sama suka, dengan perhitungan menghilangkan kemudrotan yang lebih besar.

Kesimpulan menurut penulis yaitu pembayaran hutang dengan persentase harga jual di Desa Tugu Ratu boleh saja karena melihat dari segi waktu hutang sudah terlalu lama dan dalam hukum Islam Allah SWT tidak akan mengampuni dosa seseorang yang masih punya hutang atau hak adami. orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini peneliti ingin memberikan saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Kepada Penjual Tanah

Dalam transaksi jual beli tanah harus ada bukti akurat dan saksi diatas hitam diatas putih yang bisa dipertanggungjawabkan agar menjaga suatu hari nanti jika terdapat masalah.

2. Kepada Pembeli

Dalam transaksi jual beli tanah harus ada bukti akurat dan saksi diatas hitam diatas putih agar menjaga suatu hari nanti jika terdapat masalah.

Dalam Prosedur hutang piutang harus ada kesepakatan tertulis yang dimiliki oleh kedua belah pihak dan terdapat saksi, jika suatu saat nanti terjadi masalah sudah memiliki bukti yang kuat dan tidak dimanfaatkan

orang lain. Keterbukaan dalam rumah tangga pun dianggap perlu, karena yang terjadi ini akibat tidak ada keterbukaan diantara suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003).
- Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990).
- Ahmad Abu Al-Fath, *Al-Mu'amalat Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Qawanin Al-Mishriyyah*, (Mesir: Matba'ah Al-Busfir, 1913)
- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991).
- Ali Muhammad Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004).
- Arikunto, Suharsimi, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010)
- Azzam, Abdul Aziz, Muhammad, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Az.*
- Azhar Basyir, Ahmad, *Garis Besar Sitem Ekonomi Islam*, cetakan II, (Yogyakarta Universitas Gadjahmada: BPFE, 1981).
- Azami M.M, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000).
- Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, (PT Remaja Rosdakrya, Bandung, 1991).
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, t.th).
- Basya, *Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifah Ahwal Al-Insan*, (Kairo: Dar Al-Furjani, 1983),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet.IV, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani Ahmad Ikhwan, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, (Jakarta:Gema Insani, 2005).
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jilid 1, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981).
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 1-2-3, Yayasan Nurul Islam. Haris Abdullah, Juz III, Asy-Syifa', (Semarang, 1990).
- H.Abdul Syekh Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta:Kencana, 2006).
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media, Jakarta, 2009.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta:Bumi Aksara, 2010).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Ja'far, Khumaedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan bisnis*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung , Bandar Lampung, 2015.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mujieb Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Mulyadi, *Akutansi Biaya*, (Yogyakarta:UPPAMP Yogyakarta, 2005).
- Mas'adi, Ghufro, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002).
- Muslim Imam, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, 2006).

- Mishbah Mustafa, Bahagian Pertama, Cet. Ke-2, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 1995).
- Pabundu Tika, Muhamad, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006).
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2006).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Raco, R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Bandung: Al Ma'arif, 1987).
- Salim, Peter dan Salim, Yeni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pers, 1991).
- Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004)
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003).
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. II, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Sudjono, Ahmad, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Ma'arif).
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Surawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Shihab, M Quraish *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Syafe" i Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010).

Taqiuddin Abu bakar, Imam Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H.

TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1975).

Yakub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Diponogoro, Bandung, 1983).

Zuhaili, Wahbah, *Buku Pintar al-Quran Seven In One*, terj. Imam Ghazali Masykur, Cet. III, (Jakarta: Almahira, 2009).

“Gharar dalam objek transaksi”, tersedia di: <http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/08/gharar.html> diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

<https://id.Facebook.Com/Kilaubintangbanksaudara/Posts/576421909078771>,
Tanggal 23 Desember 2017.

[Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/35701/3/Chapter%20II.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/35701/3/Chapter%20II.Pdf),
Tanggal 20 Oktober 2016.

[Http://www.radiorodja.com/2014/11/27/pengertian-kaidah-fiqih-faidah-sumber-dan-hukum-berhujjah-dengan-kaidah-fiqih-kaidah-fiqih-ustadz-abu-yala-kurnaedi-lc/](http://www.radiorodja.com/2014/11/27/pengertian-kaidah-fiqih-faidah-sumber-dan-hukum-berhujjah-dengan-kaidah-fiqih-kaidah-fiqih-ustadz-abu-yala-kurnaedi-lc/), Tanggal 20 Oktober 2016.

[Http://trainingictsusilawati.blogspot.co.id/2016/05/kaidah-fiqih-muamalah.html](http://trainingictsusilawati.blogspot.co.id/2016/05/kaidah-fiqih-muamalah.html), Tanggal 20 Oktober 2016.